

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Sofia Malik, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Jurnal Ius Constituedum , Vo 5 Nomor 2 oktober 2020,

Emilda Firdaus, Badan permusyawaratan desa dalam tiga priode pemerintahan di Indonesia, jurnal ilmu hukum Volume 2 NO.2

Dody Eko Wijayanto, Kepala desa dengan badan permusyawaratan Desa dalam pemebentukan peraturan desa, jurnal idependen Vol. 2 No.1.

Emilda Firdaus, Badan permusyawaratan desa dalam tiga priode pemerintahan di Indonesia, jurnal ilmu hukum Volume 2 No.2.

Sugiman, Pemerintahan Desa, Binamulia Hukum, Vol. 7 No 1, Juli 2018. hlm. 86-87

Gusti Made Bayu Nugraha DKK,*Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume, 2, No.3-Desember 2021.

Pembentukan Peraturan Desa yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa,Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, Made Nurmawati.

Iswanto, Peraturan Desa dan Kedudukan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol.4 No.2, September 2020.

Youla C. Sajangbati, Penyelenggaan Pemerinhan Desa Berdasarkan Undang-Undang NOMOR 6 Tahun 2014, Lex Adminisstratum, Vol. III/N0.2/April/2015.

Rico Masuara , *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

Buku:

- Muhammad Harzal, Kedudukan dan peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa,
- Sudikono Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 49.
- Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, hlm 81.
- H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Alumni, Bandung: PT., 2014), hlm 217.
- E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. 4, 1960, hlm. 17-24
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2.
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 30.
- Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23.
- Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Misdayanti dan Kartasapoetra. 1993. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta; Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm.15
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daaerah. Bandung: Mandar Maju.
- Kushandajani *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, (Semarang, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang, 2008), hlm.70-71
- Yuliandi. 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 25.
- Maria Farida Indrati Soepraoto. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan ; Dasar-Dasar dan Pembentukannya* , Jakarta: Kanisius, hlm 25
- Putra Astomo, Kedudukan dan Pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan,jurnal konstitusi, Volume 15, Nomor 2, juni 2018.
- Jimly Assidiqie,,Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm.63

Halim, Hamza. Kemal Redindo. 2009. *Cara Praktis menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana Media Group. Jakarta.

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118..

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm.35.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

M. Firmanhadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam Menjalankan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013, hlm. 1.

Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia., hlm. 26.

Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-undang

Pasal 1 ayat 1 UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.

Pasal 1 ayat 15 UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 1 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Pelaksana

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Ross Yuliastina, Ach. Andiriyanto, *Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa*, Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN ‘Veteran’ Jatim, Volume 9 Nomor 1 April tahun 2019. hlm 4-5

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 32

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan
Desa.

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia -Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Peremusyawaratan Desa

Internet :

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, Di Unduh Pada
Hari Selasa Tanggal, 26-juli-2022, Pukul 22:19.

<https://sumber-karangan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/45-DASAR-PENYUSUNAN-PRODUK-HUKUM-DESA>. Di unduh pada tanggal tanggal 30
agustus 2022, pukul 04.33 WIB.

